

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara agraris terbesar kedua di dunia setelah Brazil, dengan luas lahan pertanian mencapai 36.817.086 hektar (FAO, 2023). Kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi berbagai komoditas pertanian, baik pangan, hortikultura, maupun perkebunan, potensi besar ini belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Wang et al., (2024), hal ini tercermin dari produk domestik bruto per kapita Indonesia yang masih relatif rendah, yaitu hanya sebesar 4.248 USD, jauh di bawah Brazil yang mencapai 9.032 USD (World Bank, 2023), diperlukan pendapatan yang stabil dan tinggi untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi perubahan struktur sosial dan daya beli suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga dengan naiknya aktivitas produksi barang dan jasa yang diwujudkan dengan kenaikan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari peningkatan output per kapita yang terjadi karena investasi pada modal dan kemajuan teknologi dalam jangka panjang (Blanchard & Johnson, 2014).

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil keputusan mikroekonomi yang mencerminkan perilaku individu, perusahaan, dan rumah tangga dalam hal konsumsi, tabungan, dan investasi dan dengan makroekonomi seperti inflasi,

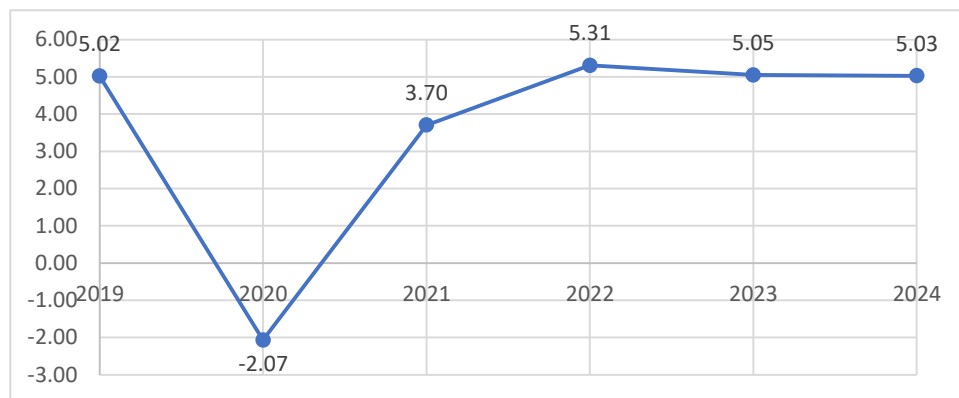
pengangguran, Produk Domestik bruto (PDB), serta kebijakan fiskal dan moneter Mikroekonomi menyediakan fondasi, yaitu bagaimana keputusan skala kecil berkembang menjadi pola konsumsi dan produksi, yang pada gilirannya memengaruhi agregat ekonomi. Sementara itu, makroekonomi memberikan kerangka besar tentang bagaimana keseluruhan perekonomian bergerak dan menentukan strategi pembangunan, khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan per kapita. Karena itu, pertumbuhan yang berkelanjutan menuntut keseimbangan harmonis antara dinamika mikro dan kebijakan makro yang tepat, supaya tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan dan peningkatan kemiskinan (Kostis, 2021).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan, salah satunya ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar dunia dan tenaga kerja. Ketimpangan pembangunan di mana pertumbuhan lebih terpusat di wilayah seperti Jawa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terlalu bergantung pada konsumsi domestik, sementara kontribusi sektor investasi dan ekspor belum maksimal (Ode, 2025).

Permasalahan pertumbuhan ekonomi Indonesia bersumber dari rendahnya penyerapan tenaga kerja, ketimpangan pembangunan wilayah dan rendahnya konsumsi rumah tangga. Pasalnya, peningkatan daya beli masyarakat langsung meningkatkan permintaan barang dan jasa, menciptakan efek pengganda *multiplier effect* (Suhada et al., 2019).

Untuk melihat seberapa banyak aktivitas ekonomi menghasilkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu, maka perlu

dilihat rasio pertumbuhan ekonomi umum yaitu Produk Domestik Bruto (PDB). Laju pertumbuhan PDB atau pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan kenaikan pendapatan masyarakat (Triastuti & Pratomo, 2023). Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi pada gambar 1.1



**Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi 2019-2024 (Persen)**

Sumber: World Bank, BPS Indonesia 2025

Dapat dilihat pertumbuhan ekonomian Indonesia pada tahun 2019 mencapai 5,02%, yang menunjukkan kondisi yang diharapkan Bank Indonesia sebelum pandemi. Pertumbuhan mengalami guncangan ekonomi yang signifikan dan turun menjadi -2,07% pada tahun 2020, sebagian besar disebabkan oleh pandemi COVID-19. Perbaikan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,70%, diikuti oleh puncak pemulihan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31% kemudian kembali menurun pada dari 2023 sampai 2024.

Sari et al., (2022) pada saat pandemi yang mampu ditangani pemerintah hingga pertumbuhan ekonomi mendapatkan 3,70%, dengan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mengelontorkan anggaran sebesar Rp 172,1

Triliun untuk mendorong kemampuan daya beli, dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Tunai Langsung (BLT) hal ini kita patut mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mampu menahan gejolak -2,7% pertumbuhan ekonomi semasa pandemi.

Pada tahun 2023-2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan akibat menurunnya permintaan agregat serta kinerja sektor-sektor strategis. Konsumsi rumah tangga turun dari 5,1% menjadi 4,5% (yoy), sementara investasi melambat dari 5,8% menjadi 5,0%. Sektor makanan dan minuman juga mengalami perlambatan signifikan dari 10,9% menjadi 7,9% (Skri, 2024).

Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang beragam mengenai kontribusi variabel ekspor pertanian, inflasi dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Arifah & Kim, (2022) menemukan bahwa peningkatan ekspor pertanian sebesar 1% dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,69%. Cili & Alkhaliq, (2022) menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan jika berada pada tingkat moderat. Sari, (2022) menambahkan bahwa peningkatan 1% pada tingkat pendidikan dapat meningkatkan output ekonomi hingga 2,01%.

Ada juga penelitian menyimpulkan hubungan yang negatif. Lisa & Juanda, (2022) menemukan bahwa ekspor sektor pertanian berdampak negatif terhadap PDRB di lima provinsi di Sumatera. Aguslim, (2017) mengungkapkan bahwa pajak ekspor berdampak negatif terhadap pertumbuhan dalam jangka pendek. Arifah & Kim, (2022) juga mencatat bahwa inflasi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam konteks tertentu, dan Andryirawan et al., (2024)

menemukan bahwa tambahan inflasi sebesar 1% menurunkan PDB per kapita sekitar 0,25%. Farida, (2023) menambahkan bahwa ketimpangan pendidikan juga berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam sebuah penelitian pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Mu'arif & Soebagyo, (2023) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh ekspor. Sejalan dengan yang diutarakan oleh Sundusiyah et al., (2021) ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

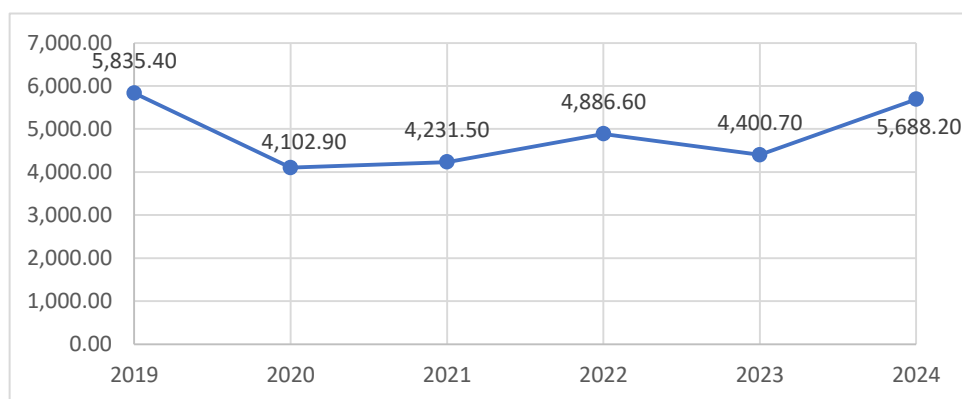
Kegiatan ekspor dalam pertumbuhan sangat penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Karena ekspor dapat menyebar ke berbagai wilayah negara memungkinkan peningkatan produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekspor merupakan sumber devisa yang penting bagi setiap negara dalam perekonomian terbuka (Hanifah, 2022).

Ekspor adalah salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena berkontribusi langsung terhadap pendapatan nasional dan cadangan devisa. Dalam ekonomi terbuka seperti Indonesia, peningkatan ekspor mendorong produksi, penyerapan tenaga kerja, serta investasi di sektor riil. Berdasarkan temuan empiris, terdapat hubungan positif dan signifikan antara volume ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang Sundusiyah et al., (2021). Meski demikian, struktur ekspor nasional masih didominasi oleh komoditas mentah, sehingga nilai tambah yang dihasilkan belum maksimal dalam sektor pertanian.

Sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama ekonomi Indonesia, yang menyerap banyak tenaga kerja, menyumbang terhadap ketahanan pangan, dan memiliki potensi besar dalam pasar ekspor global. Menurut BPS (2023), sektor ini berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 29% tenaga kerja nasional. Selain itu, fokus pada ekspor pertanian juga penting karena selaras dengan agenda pemerintah dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan memperkuat kedaulatan pangan berbasis ekspor berkelanjutan.

Permasalahan sektor ekspor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih terbatas karena sebagian besar produk yang diekspor masih dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah rendah.

Permasalahan yang dihadapi mencakup rendahnya produktivitas petani, keterbatasan akses teknologi, infrastruktur logistik yang belum memadai, serta tantangan dalam pemenuhan standar mutu dan sertifikasi internasional. Dapat dilihat hubungan variabel ekspor pertanian dan pertumbuhan ekonomi sebagai Berikut.



**Gambar 1. 2 Ekspor Pertanian 2019-2024 (Juta Dollar)**

Sumber: Bank Indonesia, 2025

Ekspor pertanian Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, ekspor pertanian berada pada level yang tinggi yaitu 5.835,4 juta dolar, terjadi penurunan drastis pada ekspor pertanian di tahun 2020 yang mencapai 4.102,90 juta dolar sebagai dampak langsung dari pandemi *COVID-19*, sementara ekspor pertanian terus mengalami peningkatan sedikit demi sedikit tahun 2021 mencapai 4.231,50 juta dolar dan tahun 2022 mencapai 4.886,60 juta dolar, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali mencapai 4.400,70 juta dolar, hal ini disebabkan oleh penurunan ekspor pertanian Indonesia, khususnya pada komoditas utama seperti minyak kelapa sawit (CPO) penyumbang ekspor pertanian terbesar, disebabkan oleh regulasi ketat dari Uni Eropa terkait standar keberlanjutan menambah tekanan terhadap ekspor (Dermoredjo et al., 2025).

Pada tahun 2024 ekspor pertanian mengalami peningkatan dikarenakan Pemerintah mendorong ekspor pertanian melalui insentif, kemudahan perizinan, dan fasilitasi diplomasi, yang terbukti meningkatkan volume dan frekuensi pengiriman ekspor, melalui program Gerakan Tiga Kali Ekspor Pertanian (Gratieks) (Dermoredjo et al., 2025). Ekspor pertanian tumbuh sebesar 6,79% (USD 658,18 miliar) didorong oleh Gratieks, dan peningkatan permintaan dan harga komoditas seperti kedelai dan produk olahan turut mendukung kinerja ekspor Indonesia (BPS, 2022).

Menurut pandangan Arfiani, (2019) Variabel ekspor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang kecil terhadap pertumbuhan ekonomi, namun ekspor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar.

Oleh karena itu harus memperhatikan data ekspor Indonesia pada tahun 2019 sampai 2024.

Adapun penelitian ekspor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Nugroho, (2023), menangkap hal yang berbeda bahwa ekspor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek, namun tidak signifikan dalam jangka panjang. Adapun variabel pajak yang berhubungan dengan penelitian ini adalah variabel pajak ekspor.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal satu, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

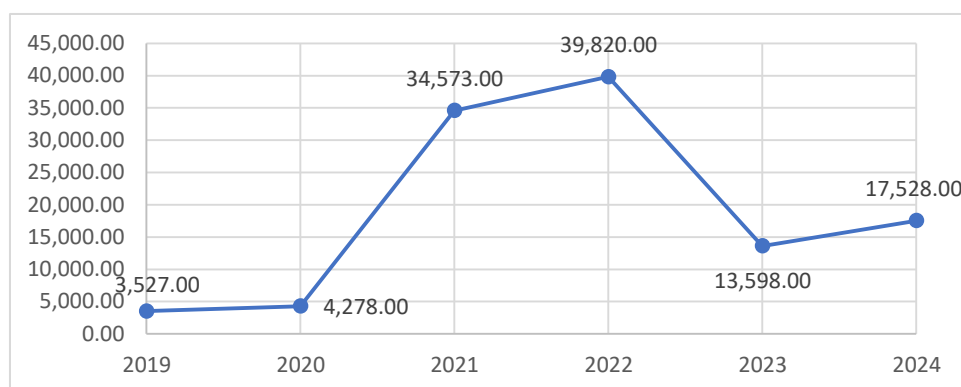
Pajak sebenarnya bisa di pandang juga sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat penerimaan dan pengenaan wajib pajak, di Indonesia sendiri rasio pajak pada tahun 2023 hanya 10,31% terhadap realisasi anggaran APBN, hal ini terbilang sangat kecil dari besaran rasio penduduk Indonesia tetapi ini memang menjadi agak sulit untuk di katakan sebagian besar penduduk tidak kena wajib pajak, hal ini terjadi ada dua hal, pertama penduduk Indonesia tidak tercatat langsung pendapatan pada usaha dikarenakan bukan sektor formal dan yang kedua dikarenakan rakyat Indonesia masih di bawah garis kemiskinan (BPS, 2024).

Berdasarkan penelitian terbaru Anugrah et al., (2024) ekspor pertanian dengan nilai mencapai sekitar IDR 16,19 triliun, pertumbuhan ekspor mendorong ekspansi produksi domestik yang berujung pada peningkatan ekspor dan positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara sehingga memperluas basis pengenaan pajak ekspor.

Pajak ekspor adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dikarenakan adanya aktivitas ekspor yang dilakukan oleh pelaku ekspor, Pajak ekspor sendiri sebenarnya memiliki peran yang sangat krusial dalam perdagangan internasional hal ini akan berdampak langsung pada pengekspor belum lagi adanya politik ekonomi di negara pengimpor yang melakukan perdagangan, harga komoditas pengekspor bisa melambung tinggi akibat apabila salah mengambil kebijakan (Laborde et al., 2013).

Pajak ekspor memiliki hubungan yang kompleks terhadap pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, pajak ekspor berfungsi sebagai alat untuk mendorong pengolahan lanjutan di dalam negeri (hilirisasi), yang dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja, sehingga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Agusalim, 2017). Pajak ekspor yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, mengurangi volume ekspor, serta menurunkan pendapatan pelaku usaha dan petani. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi atau dukungan produksi, kebijakan pajak ekspor yang ketat justru bisa menghambat ekspansi sektor-sektor strategis (Gani & Gupta, 2024). Oleh karena itu, pengaruh pajak ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi sangat tergantung elastisitas ekspor terhadap harga.

Pada PMK No 39, (2022) pasal 2 mengatur barang yang dikenakan pajak ekspor terdiri dari berbagai komoditas pertanian, yaitu kulit dan kayu; biji kakao; kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya. Untuk melihat grafik hubungan pajak ekspor sebagai Berikut:



**Gambar 1.3 Pajak Ekspor 2019-2023 (Miliar Rupiah)**

Sumber: Bank Indonesia, 2025

Grafik diatas menunjukkan perkembangan pajak ekspor Indonesia selama periode 2019–2024. Terlihat bahwa pada tahun 2019–2020 terjadi sedikit kenaikan pajak ekspor dari Rp 3,527 ke Rp 4,278 miliar, kemudian terjadi kenaikan tajam pada 2021 menjadi Rp 34.573 miliar dan pada 2022 naik lagi menjadi RP 39,820 miliar yang di sebabkan naiknya kebijakan pajak ekspor oleh PMK 2021, namun pada 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi Rp 13,598 miliar hal ini di sebabkan oleh disebabkan oleh regulasi ketat dari Uni Eropa terkait standar dan pemboikotan produk sawit Indonesia, menambah tekanan terhadap ekspor (Dermoredjo et al., 2025). Pada 2024 pajak ekspor kembali naik Rp17,528 miliar hal ini di sebabkan oleh naiknya ekspor produk pertanian (BPS, 2024).

Terdapat hubungan positif antara pajak ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode pemulihan pasca pandemi (2020–2022), tetapi hubungan tersebut melemah atau tidak linier pada tahun 2023, yang menandakan bahwa pajak ekspor adalah salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, akan tetapi bukan satu-satunya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut pandangan Yuda, (2022) Pajak ekspor terbukti memberikan dampak negatif dan signifikan, mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan yang tinggi dapat menghambat ekspor, Soumahoro, (2017) menemukan bahwa penurunan pajak ekspor kakao selama krisis politik 2002–2011 berdampak positif terhadap standar hidup petani, petani dengan pajak ekspor rendah mengalami peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran konsumsi dibandingkan petani dengan pajak tinggi, yang menunjukkan bahwa penghapusan hambatan perdagangan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan harga jual produk mereka.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Laksana, (2022) menemukan bahwa kebijakan pajak ekspor bertingkat yang diterapkan pemerintah Indonesia pada komoditas mineral berhasil mengurangi ekspor bahan mentah secara signifikan, sekaligus meningkatkan ekspor produk mineral yang telah diproses, sehingga pada sektor hilir akan banyak menerima pendapatan dari nilai tambah dan akan jelas meningkatkan GDP. Dari beberapa hasil penelitian diatas mencerminkan bahwa penetapan pajak ekspor tidak relevan pada sektor pertanian, atau ada hal lain yang mempengaruhi hasil pada sektor pertanian seperti nilai nilai

tukar petani (NTP) atau turunnya nilai tukar yang dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi juga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

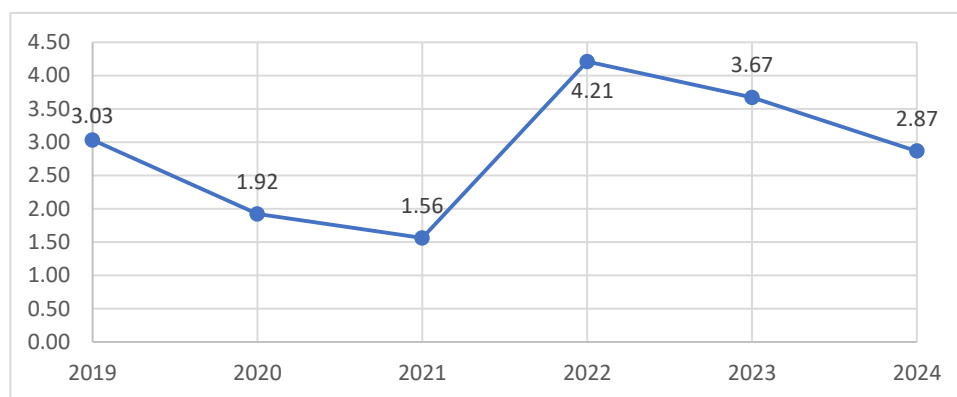
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi (*Inflation*) Menurut Blanchard (2014), inflasi adalah alat moneter yang digunakan bank sentral untuk mengatur perekonomian dan pergerakan pertumbuhan ekonomi dan likuiditas, inflasi dalam jangka panjang ditentukan oleh kebijakan moneter, khususnya pengendalian uang beredar dan suku bunga.

Tingkat inflasi merupakan salah satu determinan terhadap pertumbuhan ekonomi, perubahan dalam tingkat inflasi memiliki dampak nyata terhadap peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung tidak selalu positif, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan tingkat inflasi agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ozili, 2024). Kebijakan inflasi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi makro kebijakan yang tidak tepat dapat mengakibatkan masalah yang sangat serius dalam perekonomian (Ozili, 2024).

Inflasi memiliki hubungan negatif dengan kepuasan finansial, sementara pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif. Artinya, ketika inflasi meningkat, tingkat kepuasan finansial masyarakat cenderung menurun, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi meningkatkan kepuasan tersebut (Lee et al., 2023). Hal ini sejalan dengan yang disebut Blanchard (2014) bahwa pemerintah haruslah memilih salah satu yaitu inflasi atau output pertumbuhan

ekonomi dikarenakan keduanya tidak dapat sejalan dan harus memilih salah satunya.

Faktor pemicu Inflasi di Indonesia utamanya meliputi tekanan dari sisi permintaan, tekanan dari sisi penawaran dan ekspektasi inflasi (Bi, 2025) . Kondisi ini menyebabkan inflasi sangat sensitif terhadap gejolak global dan gangguan pasokan domestik. Inflasi juga kerap dipicu oleh kebijakan harga seperti penyesuaian BBM dan tarif listrik. Dampaknya paling dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah karena inflasi melalui penurunan daya beli. Oleh karena itu, stabilisasi inflasi membutuhkan sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan penguatan sektor riil (Ayu et al., 2025). Berikut ini perkembangan Inflasi dalam rentang waktu 2019 sampai 2024, sebagai berikut.



**Gambar 1.4 Inflasi 2019-2024 (Persen)**

Sumber: World Bank, 2025

Gambar diatas menunjukkan perkembangan inflasi dari tahun 2019-2024, dari 2019 inflasi berada pada 3,03% dan terus menurun pada 2020, 1,92% kemudian turun lagi pada 2021 yaitu 1,56% inflasi terus menurun hal ini di karenakan lemahnya daya beli masarakat yang belum pulih dari COVID-19, namun pada 2022 inflasi menukik naik 4,21% hal ini disebabkan oleh kebijakan

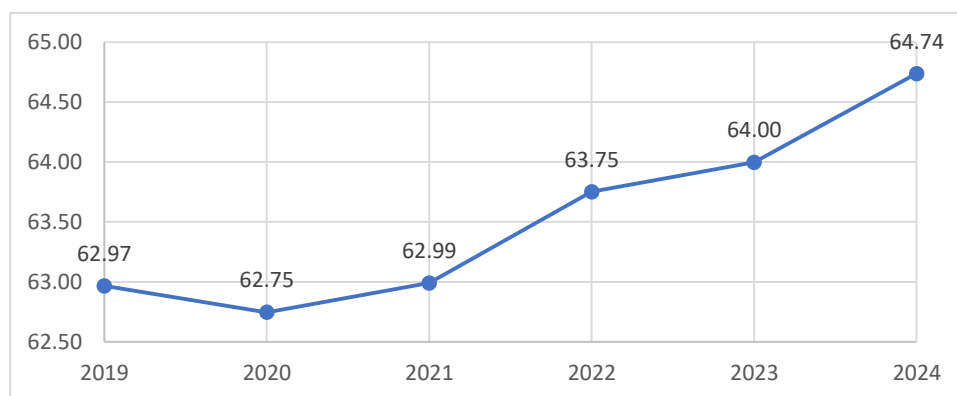
moneter pemerintah untuk menekan pertumbuhan ekonomi pada 2022, kemudian pada 2023 3,67% inflasi terus menurun 2024 menjadi 2,87%, menurut Friedman, (1968) fluktuasi inflasi disebabkan oleh lemahnya daya beli kemudian untuk menekan pertumbuhan, pada 2023-2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun.

Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya, ketika tingkat inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi cenderung menurun, dan sebaliknya, ketika inflasi menurun, pertumbuhan ekonomi justru meningkat (Ardiansyah et al., 2017). Akan tetapi sebuah penelitian yang dilakukan oleh Shehab & Farsi, (2024) bahwa kenaikan inflasi justru berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara penurunan inflasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mahendra et al., (2024) bahwa inflasi dan nilai tukar memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang berfokus pada pengendalian inflasi dan investasi pada tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan adalah jenjang atau tahapan dalam sistem pendidikan formal, nonformal dan informal yang menunjukkan sejauh mana seseorang telah menyelesaikan proses belajar-mengajar secara terstruktur Uu No 20 Tahun 2003. Tingkat pendidikan mencerminkan kualifikasi akademik atau keahlian seseorang, dan digunakan untuk mengklasifikasikan pencapaian dalam dunia pendidikan Pasal 28C ayat 1 UUD, 1945.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator utama kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Anastasios et al., 2019). Dalam teori pertumbuhan endogen, pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mempercepat adopsi teknologi, serta mendorong inovasi. Peningkatan rata-rata lama sekolah dan akses terhadap pendidikan tinggi memiliki dampak jangka panjang dalam menciptakan tenaga kerja terampil yang dapat mendorong sektor industri dan jasa (Goczek et al., 2021).

Didalam masarakat Indonesia pendidikan adalah masalah yang strutukral yang mengakar bagi bangsa ini, didalam masarakat biasanya tingkat pendidikan erat hubungannya dengan pendapatan dan status sosial masarakat. Julianto & Utari, (2019) menunjukkan tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap pendapatannya secara umum tingginya tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, berikut gambaran Angka Partisipasi Sekolah 2019-2024 sebagai Berikut.



**Gambar 1.5 Angka Partisipasi Sekolah 2019- 2024 (Persen)**

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Gambar diatas adalah perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) selama periode 2019 hingga 2024. Terlihat bahwa pada tahun 2019 APS berada di angka 62,97%, namun pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 62,75% hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 (Is, 2022). Kemudian perlahan naik 2021 62,99% pada 2022 naik signifikan menjadi 63,75%, 2023 naik perlahan menjadi 64,00% dan pada 2024 naik signifikan menjadi 64,74% hal ini disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk (Nurulpaik & Permana, 2021), kemudian oleh Fadzillah & Rahajeng, (2024) peningkatan angka partisipasi sekolah disebabkan oleh program Indonesia pintar.

Menurut Kocourek & Nedomlelová, (2018) menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memiliki pengaruh terbesar terhadap produktivitas tenaga kerja di seluruh negara yang diteliti. Kesimpulannya juga menunjukkan bahwa pendidikan menengah dan tinggi cenderung meningkatkan skala ekonomi. Bawazir et al., (2021) mengevaluasi bagaimana pendidikan dasar, menengah, dan tinggi memengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara Timur Tengah. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan menengah dan tinggi memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hassanah et al., (2022) bahwa tingkat pendidikan dan pertumbuhan penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2017–2021, baik secara simultan maupun parsial. Putri & Ratna, (2018) yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama pembangunan nasional, serta berbagai faktor yang memengaruhinya seperti inflasi, tingkat pendidikan, ekspor pertanian, dan pajak ekspor, maka menjadi relevan untuk menelaah bagaimana hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inflasi yang tidak terkendali dapat menekan konsumsi dan investasi, sementara tingkat pendidikan memengaruhi kualitas sumber daya manusia yang mendorong produktivitas. Di sisi lain, ekspor pertanian merupakan sumber devisa yang signifikan, namun nilainya sangat dipengaruhi oleh kebijakan pajak ekspor yang diterapkan pemerintah. Kompleksitas hubungan antara variabel-variabel tersebut menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengkaji sejauh mana pengaruh dan keterkaitan masing-masing variabel terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan permasalahan yang dapat menjelaskan hubungan antara inflasi, angka partisipasi sekolah, ekspor pertanian, dan pajak ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan di latar belakang dan menimbang berbagai faktor faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pergerakan perekonomian di Indonesia dengan menggunakan Variabel Ekspor Pertanian, Pajak Ekspor, Inflasi dan Angka Partisipasi Sekolah, yang atas dasar demikian penulis merumuskan Tesis yang berjudul “ **Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang dan uraian permasalahan yang di temukan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ekspor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan pajak ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Bagaimana pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh ekspor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Menganalisis pengaruh pajak ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Menganalisis pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah sesuatu yang di sebut dengan kemudahan yang kita dapat dari apa yang kita manfaatkan baik itu untuk kepentingan kita individu ataupun kelompok individu, pemanfaatan tersebut bisa banyak hal baik itu dalam mengambil keputusan dalam kebijakan dan sebagai membantu dalam analisis dalam bidang sosial dan saint.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai faktor-faktor determinan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, dengan pendekatan komprehensif terhadap sektor ekspor pertanian, kebijakan fiskal berupa pajak ekspor, dinamika inflasi, dan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.
- b. Menjadi bahan informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang meneliti tentang topik yang sama.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Untuk menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perdagangan dan fiskal yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan, seperti optimalisasi ekspor pertanian, penguatan nilai tambah ekspor melalui insentif fiskal yang tepat, serta pengendalian inflasi yang adaptif.
- b. Memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan sektor pendidikan agar investasi pendidikan diarahkan untuk memperkuat kualitas tenaga kerja yang produktif dalam mendukung ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- c. Bagi pemegang keputusan dan masyarakat yang bergerak langsung pada sektor pertanian.